

BAB I

PENDAHULUAN

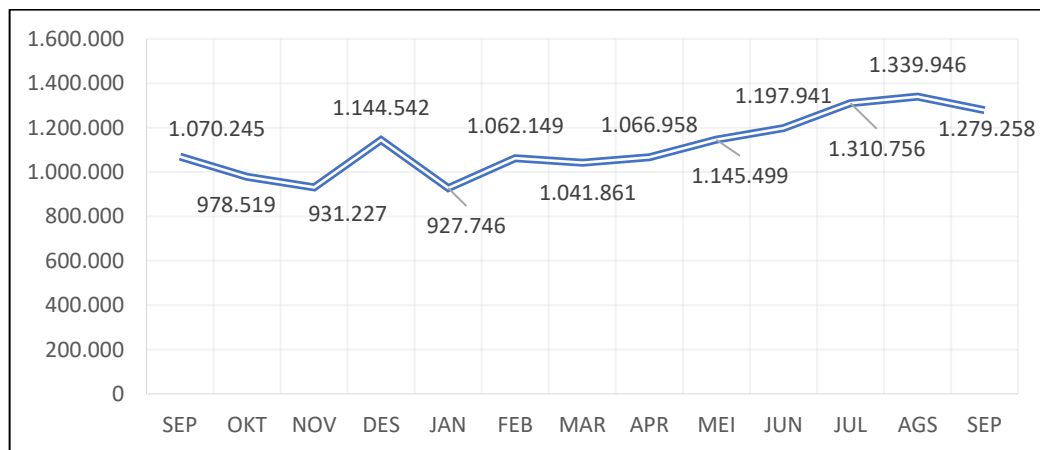
1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau di dalamnya dengan garis pantai sepanjang 108.000 km (Yanuar et al., 2023). Wilayah kepulauan yang terdiri dari wilayah darat dan laut menjadikan Indonesia dilimpahi ragam budaya, limpahan sumber daya alam, dan adat istiadat. Ragam sumber daya dan kekayaan alam yang tumbuh di Indonesia memiliki daya tarik khusus yang tidak dimiliki negara lain. Daya tarik tersebut menjadikan Indonesia memiliki banyak potensi-potensi pariwisata yang menarik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kristiono dan Susilo yaitu “Potensi pariwisata membuka peluang terhadap perekonomian masyarakat jika diolah dan dikembangkan dengan optimal. Potensi pariwisata yang timbul dari kekayaan alam Indonesia menjadi anugerah bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama (*common objective*) dengan tujuan memenuhi kebutuhan, termasuk perekonomian” (Kristiono & Susilo, 2021).

Sektor pariwisata menjadi satu dari beberapa sektor yang berperan dalam menopang perekonomian di Indonesia (Lilik, 2021). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 4 yang berbunyi “Pariwisata memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa serta mempererat persahabatan antar bangsa”. Sektor pariwisata dirancang guna

mempercepat pertumbuhan perekonomian sebab pariwisata dapat menjadi penggerak sektor-sektor lain antaranya sektor industri dan jasa. “Hal itu menjadikan pariwisata memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi antara lain, dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, sumber devisa negara, dan distribusi pembangunan” (Lusiana et al., 2021).

Menurut Yanti dan Hadya (2018) Perkembangan industri pariwisata akan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang perkembangan kunjungan wisata mancanegara di Indonesia. Jumlah kunjungan kumulatif wisatawan mancanegara periode Januari s.d September 2024 sebesar 10.372.114 kunjungan, meningkat 20,28% dibandingkan periode sebelumnya yang berjumlah 8.623.537 kunjungan. Berikut grafik kunjungan wisatawan mancanegara di tahun September 2023 – September 2024 berdasar perkembangan bulan:



Gambar 1. 1 Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara September 2023 – September 2024

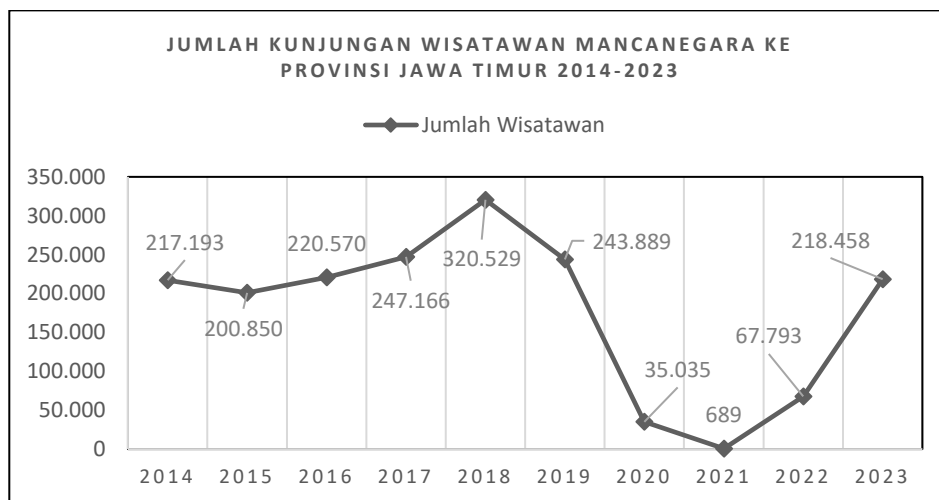
Sumber: <https://kemenparekraf.go.id/direktori-statistik/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulan-september-2024/> diakses pada 12 Oktober 2024.

Sejalan dengan perkembangan sektor pariwisata yang terus meningkat, “Pembangunan sektor pariwisata perlu berdasar pada kriteria berkelanjutan yang mengacu pada pertumbuhan pembangunan dengan didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus secara ekonomi, adil secara etika dan sosial masyarakat” (Tangian & Kumaat, 2020). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yang terpadu dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan serta pelestarian sumber daya secara berkelanjutan. Hal ini bisa diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang baik atau *good governance*, dengan adanya partisipasi aktif dari unsur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Sektor pariwisata diharap mampu untuk dapat memimpin arus pembangunan berkelanjutan. Maka dibutuhkan kajian yang lebih intensif dan menyeluruh guna mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ditimbulkan. Dengan pemahaman yang mendalam terkait potensi dan tantangan pada sektor wisata, mendorong adanya rencana strategis yang efektif untuk dapat meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada sektor pariwisata. Hal ini perlu dilakukan mengingat sektor-sektor pembangunan lainnya memiliki pengaruh yang besar dalam pengembangan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung (Eperna et al., 2021).

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia juga dapat dirasakan di Provinsi Jawa Timur. Jawa timur menjadi satu dari banyak provinsi di Indonesia yang memiliki ragam pariwisata yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyaknya objek pariwisata di Jawa Timur yang dikenal hingga

mancanegara menjadi salah satu faktor pendukungnya. Hal ini dibuktikan dengan grafik jumlah wisatawan yang terus meningkat sebagaimana dilansir pada Statistik Pariwisata Jawa Timur 2023 oleh BPS Jawa Timur 2023 sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Grafik Jumlah Wisatawan Mancanegara di Jawa Timur

Sumber: <https://jatim.bps.go.id/id/publication/2024/07/03/59507d4453ade42cfb805167/statistik-pariwisata-provinsi-jawa-timur-2023.html> diakses pada 12 Oktober 2024.

Berangkat dari grafik 1.1 diketahui bahwa terjadi penurunan wisatawan mancanegara di tahun 2020 hingga 2021 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Akan tetapi, di tahun 2023, jumlah kunjungan mulai mengalami peningkatan signifikan. Adanya peningkatan aktivitas masyarakat yang secara beramai-ramai mengunjungi tempat wisata pasca meredanya pandemi di Indonesia. Pada tahun 2023 terjadi *recovery* atau pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi yang mengalami peningkatan tiap bulannya. Selain itu, daya tarik pariwisata Jawa Timur juga membuka gerbang perekonomian di bidang transportasi, industri kreatif, penyedia makanan dan minuman, dan juga perhotelan. Dengan tingginya jumlah wisatawan yang masuk, kebutuhan barang dan jasa juga meningkat sejalan dengan permintaan. Kondisi tersebut membuka jalan perekonomian bagi sektor-sektor lain

yang bersinggungan langsung dengan sektor pariwisata. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Kamis (4/1/2024) yang dilansir pada *website* kominfo.jatimprov.go.id (2024).

Seiring dengan kemajuan inovasi di sektor pariwisata, muncul inovasi baru yang dikenal dengan Desa Wisata. Menurut Nuryanti dalam (Raharjo, 2021) “Desa wisata merupakan suatu destinasi wisata yang mengintegrasikan daya tarik pariwisata yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat dengan tata dan tradisi yang berlaku di dalamnya”. Desa wisata menyuguhkan potensi lokal desa baik dibidang sosial budaya maupun masyarakatnya dalam suatu bentuk pariwisata (Aminudin & Jamal, 2020). Dengan demikian, desa wisata menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki suatu desa di sektor pariwisata yang dapat dikembangkan guna mendukung kemandirian suatu desa.

Menurut Hadiwijoyo dalam (Raharjo, 2021) Desa wisata adalah bentuk pariwisata alternatif yang dapat mendorong pembangunan desa berkelanjutan dan didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut: (1) pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur lokal; (2) memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat; (3) berskala kecil untuk mempermudah interaksi timbal balik dengan warga desa; (4) partisipasi aktif dari masyarakat setempat; serta (5) pengembangan produk wisata pedesaan dengan beberapa kriteria, yaitu: (a) menyediakan fasilitas dan infrastruktur milik masyarakat lokal untuk mendorong keterlibatan dan akses terhadap sumber daya fisik yang mendukung kemajuan desa wisata, (b) memberikan insentif untuk peningkatan pendapatan melalui kegiatan ekonomi tradisional, (c) melibatkan penduduk setempat secara efektif dalam pengambilan

keputusan atau kebijakan mengenai bentuk pariwisata yang memanfaatkan lingkungan desa dengan pembagian pendapatan yang adil bagi warga, dan (d) mendorong pertumbuhan kewirausahaan di kalangan masyarakat setempat.

Pengembangan desa wisata memiliki peran strategis dalam kemajuan pembangunan desa. Manfaat yang dapat dirasakan dapat dilihat dari aspek alam, sosial budaya, dan juga ekonomi. Menurut Putra dan Ariana (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Manfaat Pengembangan Desa Wisata Dari Aspek Alam, Sosial Budaya, Spiritual, dan Ekonomi di Kabupaten Tabanan” mengungkapkan bahwasanya “Ditinjau dari aspek alam, desa wisata memiliki manfaat untuk dapat mengurangi alih fungsi lahan dan terjaganya kawasan konservasi serta meningkatkan kepedulian masyarakat setempat terhadap lingkungan. Pada aspek sosial mengemukakan bahwa dari adanya desa wisata masyarakat lebih menghormati akan adanya tradisi dan budaya yang ada pada desa tersebut serta usaha untuk dapat menjaga tradisi dan budaya itu secara turun-temurun. Ditinjau dari aspek spiritual desa wisata dapat menjaga dan memperkuat kelestarian tempat suci dan keyakinan keberagamaan. Kemudian dari aspek ekonomi desa wisata memiliki manfaat untuk membuka lapangan kerja baru, menambah mata pencaharian penduduk setempat, menumbuhkan UMKM, dan menekan angka kemiskinan di desa tersebut” (Putra & Ariana, 2022). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya desa wisata memiliki kebermanfaatan dari berbagai aspek. Penjagaan terhadap kelestarian alam hingga peningkatan rasa kekeluargaan serta jiwa gotong royong dapat terbangun di berbagai lapisan masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata.

Kebermanfaatan dari pengembangan desa wisata dapat dirasakan apabila dalam pengelolaannya menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dan partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan desa wisata.

Pengembangan desa wisata sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dimana upaya membangun desa wisata di wilayah ini mendukung program Nawa Bhakti Gubernur Jawa Timur 2019-2024. Hal ini selaras dengan Bhakti 7: Jatim Berdaya, yaitu memperkuat ekonomi rakyat berbasis UMKM, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta mendorong terwujudnya Desa Mandiri (Raharjo, 2021). Di lansir dari *website* Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur menjadi provinsi dengan desa mandiri terbanyak se-Indonesia pada tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur melesat mencapai 4.019 desa dan merupakan yang tertinggi di Indonesia. Dengan begitu, pengembangan desa wisata sebagai upaya perwujudan desa mandiri di Jawa Timur berperan sangat penting. Pengembangan desa wisata akan berpotensi membuka lapangan kerja baru dan lapangan usaha bagi masyarakat melalui UMKM sehingga hal tersebut dapat memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan BUMDes sampai Desa Mandiri. Jawa Timur menjadi daerah potensial dengan keunikan budaya dan kearifan lokal. Hal ini mendukung pembangunan sektor pariwisata berbasis desa wisata sebagai wujud pembangunan desa. Masyarakat desa yang otentik dan memiliki kebudayaan yang khas menjadikan peluang pengembangan wisata tanpa merubah tatanan sosial masyarakatnya. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penelitian Aminudin dan Jamal

(2020) mengungkapkan data bahwa Jawa Timur memiliki desa wisata yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota sejumlah 573 desa wisata di tahun 2021 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sejumlah 479 desa wisata (Aminudin & Jamal, 2020).

Kabupaten Kediri menjadi kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengembangkan inovasi desa wisata di wilayahnya. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Bupati Kediri Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata yang disahkan pada September 2022 dan telah dilakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Peraturan tersebut dibuat sebagai bentuk dukungan pemerintah kabupaten Kediri dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata berbasis potensi wilayah dan daya tarik alam melalui desa wisata. Adanya regulasi tersebut juga menjadi legalitas atau payung hukum bagi pengembangan desa wisata di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan desa wisata salah satunya diwujudkan dengan pemberian apresiasi berupa Anugerah Desa Wisata. Pemberian apresiasi ini diberikan dengan tujuan memberikan motivasi kepada pemerintah desa untuk terus berinovasi mengembangkan desanya dan mendorong kreativitas masyarakat lokal. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Adi Suwignyo yang dilansir pada *website* jatim.antaranews.com (2024).

Jatim.antaranews.com- “Pihaknya telah memberikan anugerah desa wisata, sebagai bekal untuk memotivasi desa yang sedang tumbuh untuk berinovasi dalam mengembangkan desa wisata agar terus lahir kreativitas di tengah masyarakat lokal. Dengan itu, pembangunan Kabupaten Kediri dapat menyentuh lapisan masyarakat desa.”

Sumber: <https://jatim.antaranews.com/berita/659241/pemkab-kediri-mendorong-pengembangan-potensi-desa-wisata> diakses pada 17 September 2024).

Desa Mejono merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Adapun wisata yang dikembangkan oleh Desa Mejono adalah Objek Wisata Gronjong Wariti. Pengelolaan Objek Wisata Gronjong Wariti dibawah naungan pemerintah Desa Mejono, yaitu BUMDesa Hapsari. Badan Usaha Milik Desa Hapsari berdiri pada tahun 2017 dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Mejono serta memiliki kontribusi nyata dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan pemanfaatan potensi asli desa. BUMDesa Hapsari merupakan BUMDesa dengan kategori Maju dimana terdapat 4 kategori yaitu Dasar, Tumbuh, Berkembang dan Maju. BUMDesa Hapsari memiliki 2 unit usaha antara lain Unit Usaha Kredit (BKD) dan Unit Usaha Wisata. Objek Wisata Gronjong Wariti merupakan unit usaha wisata yang dikelola oleh BUMDesa Hapsari dan diketuai oleh Bapak Riadi selaku masyarakat asli dan penggagas pendirian wisata.

Sebelum berkembang menjadi objek wisata, Gronjong Wariti adalah sebuah sungai keruh yang ada di tengah pemukiman warga. Lahan yang digunakan sebagai tempat berdirinya objek wisata ini juga merupakan tanah warga yang disewakan ke pihak desa untuk dimanfaatkan sebagai lahan wisata. Sejarah awal terbentuknya wisata ini berawal dari inisiatif warga setempat dan karang taruna untuk

membersihkan aliran sungai. Tepatnya pada Desember tahun 2017, dan dibutuhkan waktu satu bulan dalam upaya pembersihan aliran sungai tersebut sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata Gronjong Wariti. Upaya tersebut digarap warga dengan harapan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan menikmati keindahan dari aliran sungai serta membuka lapangan pencaharian bagi masyarakat setempat. Kemudian, pengembangan objek wisata tersebut membentuk suatu kelompok sadar wisata. Kelompok tersebut yang sampai saat ini berperan dalam pengelolaan objek wisata.

Dikutip dari *website* Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur, pada tahun 2019 tingkat kunjungan wisata di Gronjong Wariti mencapai lebih dari seribu per minggunya. Pengunjung datang dari kota lain seperti Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan sekitarnya. Capaian jumlah pengunjung dapat tembus hingga 1000 pengunjung tiap minggunya. Menurut keterangan Heru Ismanto selaku ketua BUMDesa Hapsari, Objek Wisata Gronjong Wariti menjadi pionir desa wisata di Kabupaten Kediri dengan omset menembus 300 juta rupiah walaupun tanpa memungut tiket masuk wisata dilansir dari *website* kominfo.jatimprov.go.id (2023).

kominfo.jatimprov.go.id- “.. kawasan wisata yang dinamai Gronjong Wariti kini dalam sebulannya omsetnya tembus hingga Rp 300 juta meskipun tanpa memungut tiket masuk. Heru Ismanto menceritakan, dengan capaian yang diperoleh BUMDes Hapsari, kini Gronjong Wariti menjadi pionir BUMDes se Kabupaten Kediri yang tengah mengembangkan wisata desa. Direktur Gronjong Wariti, Riadi Ndarik menerangkan, tiga tahun berjalan sejak pertama kali dibersihkan 2016 lalu, tingkat kunjungan di Gronjong Wariti kini bisa menembus lebih dari seribu orang per minggu.”

Sumber: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/gronjong-wariti-jadi-pionir-wisata-desa-di-kabupaten-kediri> Diakses pada 6 November 2024).

Kemudian dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung tersebut, Pemerintah Desa Mejono mengalokasikan dana desa guna meningkatkan sarana dan prasarana wisata salah satunya pembuatan kolam renang. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut mendukung Objek Wisata Gronjong Wariti untuk semakin berkembang menjadi lebih baik. Alhasil di tahun yang sama, Objek Wisata Gronjong Wariti memperoleh penghargaan Anugerah Desa Wisata Kabupaten Kediri 2019 dengan kategori desa inovatif yang diberikan langsung oleh Bupati Kediri Hariyanti di Lapangan Kedungmalang Kecamatan Papar pada November 2019 dilansir pada *website* radarkediri.jawapos.com (2019).

radarkediri.jawapos.com- “Bupati Haryanti mengucapkan selamat kepada semua desa yang mendapat juara dan nominasi. Menurutnya, ajang Anugerah Desa 2019 ini sangat luar biasa. Dari kegiatan ini seluruh desa berusaha menampilkan inovasi terbaik. Sebanyak 10 desa mampu menyabet penghargaan sebagai desa terbaik dalam 11 kategori yang disediakan dalam penilaian tahunan itu. Penghargaan di bidang wisata. Kali ini, pemenangnya adalah Desa Mejono, Kecamatan Plemahan.”

Sumber: <https://radarkediri.jawapos.com/events/781281253/anugerah-des-2019-penyemangat-agar-lebih-baik-lagi> diakses pada 18 September 2019).

Karakteristik wisata berbasis desa wisata yakni membutuhkan peran besar dari masyarakat (Afrizal & Oktariyanda, 2021). Dalam pengelolaan Wisata Gronjong Wariti yang dikelola oleh BUMDesa dan melibatkan masyarakat desa meliputi pihak pengelola dan pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, masyarakat selaku pengelola diberi tugas dan tanggungjawab sebagai pengelola wisata, pengelola wahana, operator, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan lainnya. Banyak dari masyarakat setempat yang bekerja di dalam wisata, dampaknya hal itu dapat menurunkan angka pengangguran di Desa Mejono.

Pemberlakuan sistem saham dengan manajemen terbuka dalam pengelolaan wahana wisata dan hal ini diatur secara tegas oleh pengelola wisata dengan menjamin transparansi dan keterbukaan pemasukan wisata untuk menjamin pemerataan pembagian hasil pendapatan wisata sesuai porsinya. Selain itu, peran besar dari pelaku UMKM yang datang dari masyarakat desa maupun dari luar Desa Mejono membawa pengaruh signifikan dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti.

Gagasan pendirian Objek Wisata Gronjong Wariti oleh warga setempat ini dibuat dengan menargetkan masyarakat menengah kebawah sebagai konsumennya. Hal ini dapat dilihat dengan pembebasan harga tiket masuk atau HTM *free*. Sistem pembayaran wisata yang diberlakukan yaitu pembayaran dilakukan di tiap-tiap wahana yang tersedia. Wahana wisata yang disediakan selain pemanfaatan daya tarik aliran sungai dengan wahana perahu juga terdapat wahana-wahanlain. Hingga tahun 2024, terdapat 42 wahana yang disediakan dan akan bertambah seiring dengan perkembangannya. Pemberlakuan tarif dalam wahana pada objek wisata ini berkisar 5.000-15.000 rupiah per wahana. Disisi lain, terdapat berbagai produk makanan lokal yang diujakan oleh UMKM dengan harga yang relatif terjangkau. Aneka ragam jualan yang diujakan di dalam objek wisata menjadikan keunikan pada wisata ini dan menarik pengunjung terlebih harga yang ditawarkan sesuai sesuai dengan standar masyarakat menengah kebawah yang menjadi sasaran dari Objek Wisata Gronjong Wariti.

Perkembangan Objek Wisata Gronjong Wariti yang sistematis menjadi wujud nyata dari optimalisasi peran dari *stakeholder*. Menurut Hertifah dalam

(Nugroho et al., 2022) “*Stakeholder* adalah individu atau kelompok atau instansi yang memiliki keabsahan dalam membangun suatu program dan memiliki tujuan yang sama. Dalam pengembangan sektor pariwisata, *stakeholder* berperan sebagai pembuat kebijakan serta perencanaan yang sistematis seperti penyediaan dan pembangunan infrastruktur oleh sektor publik untuk mendukung pengelolaan wisata dan sebagai upaya peningkatan kualitas kerja”. Dengan demikian pengembangan sektor pariwisata berbasis desa wisata membutuhkan peran yang optimal dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keseimbangan peran dalam pengembangan desa wisata akan membentuk harmonisasi yang sempurna dalam pengelolaan tempat wisata terlebih wisata rintisan.

Pada prakteknya, dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti penyelenggaraan kolaborasi antar *stakeholder* dapat dilihat dari pembagian peran dalam pengelolaan wisata. Dalam pengelolaan objek gronjong wairiti, *stakeholder* yang terlibat antara lain Pemerintah Desa selaku penanggungjawab, BUMDesa Hapsari selaku pengelola, Pelaku UMKM dan masyarakat setempat. BUMDesa sebagai pihak pengelola memberlakukan sistem manajemen terbuka dimana adanya regulasi berupa sistim saham untuk kepemilikan setiap wahana wisata dan lahan yang digunakan sebagai tempat wisata. Kemudian, untuk setiap pelaku UMKM dan jasa parkir wisata yang berjualan didalam area wisata diwajibkan untuk memberikan iuran wajib yang diberikan ke pihak pengelola wisata guna dikelola untuk pengembangan wisata. Kesepakatan tersebut terjalin antar *stakeholder* dalam sistem saham ini disetujui bersama oleh pihak yang terlibat dengan membangun kepercayaan satu sama lain.

Disamping kesuksesan pengelolaan Wisata Gronjong Wariti, masih ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaannya. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Afrizal dan Oktariyanda (2021) dengan judul “Manajemen Strategi Desa Wisata Gronjong Wariti Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Mejono Kabupaten Kediri” ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan objek wisata ini. Desa Wisata Gronjong Wariti dinilai belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah daerah, sebagaimana ditegaskan oleh pihak pengelola yang menyatakan bahwa program pemberdayaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri kurang tepat sasaran. Minimnya dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia, menyebabkan lambatnya perkembangan Desa Wisata Gronjong Wariti, sehingga mayoritas wahana wisata yang ada dikelola secara mandiri oleh warga melalui sistem bagi hasil atau pembagian saham. Pengelolaan Desa Wisata Gronjong Wariti juga menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, karena masih banyak warga yang belum berkontribusi secara optimal dalam bentuk tenaga dan pemikiran. Rendahnya keterlibatan ini diakibatkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wisata tersebut, serta rendahnya kesadaran untuk memanfaatkan lahan pribadi sebagai lokasi wahana wisata, yang akhirnya menghambat pengembangan Desa Wisata Gronjong Wariti (Afrizal & Oktariyanda, 2021). Hal ini sejalan dengan hasil pra-observasi yang peneliti lakukan pada pengelola Wisata Gronjong Wariti. Dari rentan tahun 2021 hingga 2024,

permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan wisata ini dirasa belum menemukan pemecahan masalah.

Berangkat dari permasalahan tersebut, diketahui bahwa dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti masih terdapat permasalahan yang signifikan berkaitan dengan peran pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Dalam praktik pengembangan desa wisata, harus memiliki hubungan yang seimbang dari kolaborasi pemangku kepentingan yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Untuk itu dalam mengoptimalkan atau menggambarkan sejauh mana proses kolaborasi antar pemangku kepentingan, terdapat teori kolaborasi atau model *collaborative governance* yang menurut Ansell & Gash (2007), antaranya “Kondisi awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan, Proses Kolaborasi meliputi: *face to face* (dialog tatap muka), *truist building* (membangun kepercayaan), *commitment to proses* (komitmen terhadap proses), *shared understanding* (saling memahami) dan *intermediate outcomes* (hasil antara)”. Teori ini membantu untuk dapat mendeskripsikan bagaimana proses kolaborasi antar aktor salah satunya dalam pengembangan wisata seperti pengembangan Wisata Gronjong Wariti.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Collaborative governance* dalam Pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri**".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana *Collaborative governance* dalam Pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti serta mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat prosesnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1.1.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Administrasi publik dan Pemberdayaan Masyarakat serta dapat menambah literatur kajian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata.

1.1.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang mendalam dalam bidang pemberdayaan masyarakat khususnya pada kajian *Collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata.

2. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur dan referensi bagi penelitian sejenis di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bagi Pemerintah Desa Mejono

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai panduan dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.